

Upaya Pemerintah Suriah Menghadapi Kontraksi Pertumbuhan Rumah Tangga Yang Buruk Melalui Perspektif Keamanan Ekonomi Dalam Konsep Keamanan Manusia

The Syrian Government's Efforts to Deal with the Poor Contraction of Household Growth Through the Perspective of Economic Security in the Concept of Human Security

Yulia Rimapradesi^{a,1}, Syuryansyah^{b,2}, Aulia Srifauzi^{c,3}

^{a,b}Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662

^cProgram Studi Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama, Jalan KL Yos Sudarso Km 6,5 No. 3A Kel. Tanjung Mulia, Medan Deli, Medan, Sumatera Utara, 20241, Indonesia
yuliarimpradesi@fisip.unsri.ac.id¹, syuryansyah@fisip.unsri.ac.id², aulia.srifauzi@gmail.com³

ABSTRAK

Konflik Suriah yang terjadi dalam beberapa dekade melumpuhkan segala aspek negara. Sektor yang paling terlihat salah satunya adalah hancurnya keadaan ekonomi Suriah. Konflik menyebabkan warga Suriah tidak memiliki kemampuan sendiri untuk mensejahterakan ekonomi rumah tangganya. Hal ini menjadi sebuah masalah dalam perspektif keamanan terutama dalam sub kajian keamanan ekonomi. Perlu adanya upaya pemerintah untuk membangun keamanan ekonomi terutama di sektor ekonomi rumah tangga yang kontraksinya bisa dikatakan buruk. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang di eksplor melalui studi Pustaka, dan dianalisis melalui teori perspektif keamanan ekonomi. Tulisan ini mendapatkan salah satu upaya pemerintah dalam usaha menggerakkan kembali berbagai sektor negaranya terutama untuk ekonomi adalah dengan strategi reintegrasi pasca perang.

Kata Kunci : Keamanan ekonomi, Konflik suriah, Pertumbuhan rumah tangga

ABSTRACT

The Syrian conflict that has occurred for decades has paralyzed all aspects of the country. One of the most visible sectors is the destruction of the Syrian economy. The conflict means that Syrians do not have the ability to prosper their household economy on their own. This is a problem from a security perspective, especially in the sub-study of economic security. There needs to be government efforts to build economic security, especially in the household economic sector, where contraction can be said to be bad. By using qualitative research methods which are explored through literature study, and analyzed through economic security perspective theory. This article examines one of the government's efforts to revitalize various sectors of the country, especially the economy, namely the post-war reintegration strategy.

Keywords : Economic security, Suriah conflict, Household growth

Info Artikel :

Disubmit: 07 Desember 2024

Direview: 08 Januari 2025

Diterima : 10 Februari 2025

Copyright © 2025 – PIR Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Pada bulan Maret 2011 protes anti-pemerintah pecah di Suriah, yang diperintah oleh keluarga Asad sejak tahun 1971. Dua kelompok oposisi muncul, dimana satu kelompok politik, satu lagi kelompok bersenjata dengan kepemimpinan keduanya yang sebagian besar berbasis di pengasingan. Kelompok politik membentuk Dewan Nasional Suriah (SNC), sementara pembelot militer membentuk Dewan Nasional Suriah Tentara Pembebasan Suriah (FSA), yang mengklaim kepemimpinan atas oposisi bersenjata namun wewenangnya umumnya tidak diakui oleh kelompok bersenjata lokal. Meningkatnya kekerasan mendorong Presiden Obama pada bulan Agustus 2011 untuk menyerukan Presiden Bashar

Asad untuk meninggalkan kekuasaan. Sementara itu, Negara Islam Irak mengirimkan anggotanya ke Suriah untuk beroperasi sebagai kelompok baru bernama Front Nusra. Konflik menjadi semakin sengit, ketika Suriah mulai menggunakan artileri dan pesawat sayap tetap untuk menyerang sasaran oposisi (Blanchard, 2023).

Serangan ekstremis menjadi lebih sering terjadi, dan pada bulan Februari Amerika Serikat menutup kedutaan besarnya di Damaskus karena alasan keamanan. Kelompok bersenjata mulai merebut wilayah di seluruh Suriah, terutama di daerah pedesaan, sementara pemboman di Damaskus menewaskan beberapa pejabat senior rezim. Amerika Serikat dan Rusia menandatangani Komunike Jenewa, yang menyerukan pembentukan badan pemerintahan transisi di Suriah dengan kekuasaan eksekutif penuh, dan telah menjadi dasar pembicaraan yang disponsori PBB antara pemerintah dan oposisi. Oposisi politik Suriah membentuk bentuknya yang sekarang sebagai Koalisi Nasional Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah—alias Koalisi Oposisi Suriah (SOC), atau *Ettilaf* dalam bahasa Arab. (Blanchard, 2023). Kemudian krisis ini terus berlangsung dengan adanya ISIS, serangan senjata kimia, krisis ekonomi berkepanjangan tidak dapat dihindari hingga 2024 ini.

Konflik yang terjadi selama lebih dari satu dekade dan diperparah oleh guncangan eksternal semakin memperburuk situasi ekonomi Suriah yang buruk pada tahun 2023 dan menyebabkan penurunan kesejahteraan rumah tangga di Suriah secara dramatis, menurut dua laporan baru Bank Dunia yang dirilis hari ini. Kekurangan dana yang terus berlanjut dan terbatasnya akses terhadap bantuan kemanusiaan semakin menguras kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah melonjaknya harga-harga, berkurangnya akses terhadap layanan-layanan penting dan meningkatnya pengangguran (World Bank Group, 2024).

Situasi ekonomi Suriah terus memburuk pada tahun 2023. Aktivitas ekonomi, yang ditunjukkan dengan emisi cahaya malam hari, menurun sebesar 1,2% year-on-year (yoy), terutama di sepanjang perbatasan barat Suriah, yang sebagian disebabkan oleh melemahnya aktivitas perdagangan. Data pembakaran gas pada malam hari juga menunjukkan penurunan produksi minyak sebesar 5,5% yoy, sebagian disebabkan oleh kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi dan konflik. Meskipun terjadi peningkatan produksi pertanian akibat membaiknya kondisi cuaca pada tahun 2023 (dari titik terendah dalam sejarah pada tahun 2022), konflik tersebut tetap berdampak parah pada sektor pertanian dengan terjadinya perpindahan besar-besaran petani dan kerusakan parah pada infrastruktur dan sistem irigasi yang menyebabkan hilangnya nyawa petani. penurunan hasil panen (The World Bank, 2024).

Gangguan yang disebabkan oleh konflik juga berdampak buruk pada perdagangan luar negeri. Jatuhnya produksi industri dan pertanian dalam negeri meningkatkan ketergantungan Suriah pada impor. Ketergantungan pada impor pangan, meskipun sudah menjadi masalah sebelum tahun 2011, juga semakin meningkat seiring dengan konflik yang terjadi (International Rescue Committee, 2022). Pada tahun 2023, pound Suriah terdepresiasi secara substansial sebesar 141% terhadap dolar AS, sementara inflasi harga konsumen diperkirakan meningkat sebesar 93%, yang diperburuk oleh pemotongan subsidi pemerintah. Ketika perekonomian melambat, pendapatan fiskal terus menurun. Sebagai tanggapannya, pihak berwenang semakin mengurangi pengeluaran, terutama dengan pemotongan tajam belanja modal dan terus memperketat program subsidi.

Syria Economic Monitor Musim Semi 2024 memperkirakan kontraksi ekonomi yang berkepanjangan akan terus berlanjut pada tahun 2024. Mengingat ketidakpastian yang sangat tinggi, PDB riil diperkirakan akan berkontraksi sebesar 1,5% pada tahun 2024, memperpanjang penurunan sebesar 1,2% pada tahun 2023. Konsumsi swasta, mesin utama pertumbuhan, akan tetap terkendali karena kenaikan harga terus mengikis daya beli. Investasi swasta diperkirakan akan tetap lemah di tengah situasi keamanan yang bergejolak serta ketidakpastian ekonomi dan kebijakan yang besar. Inflasi diperkirakan akan tetap tinggi pada tahun 2024 karena dampak langsung depresiasi mata uang,

kekurangan yang terus-menerus, dan potensi pemotongan subsidi pangan dan bahan bakar lebih lanjut. APBN tahun 2024 menandakan berlanjutnya tren pengurangan subsidi untuk komoditas-komoditas penting (World Bank Group, 2024).

Laporan khusus memberikan gambaran singkat tentang temuan-temuan utama laporan Kesejahteraan Rumah Tangga Suriah. Pada tahun 2022, kemiskinan mempengaruhi 69% populasi setara dengan sekitar 14,5 juta warga Suriah. Kemiskinan ekstrem, meski sebenarnya tidak ada sebelum konflik, berdampak pada lebih dari satu dari empat warga Suriah pada tahun 2022 dan mungkin akan semakin memburuk akibat dampak buruk gempa bumi pada bulan Februari 2023. Berbagai faktor eksternal, termasuk krisis keuangan tahun 2019 di Lebanon, pandemi COVID-19, dan perang di Ukraina, telah berkontribusi semakin mengikis kesejahteraan rumah tangga Suriah dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut laporan tersebut, kemiskinan di Suriah mempunyai konotasi spasial yang kuat. Lebih dari 50% masyarakat sangat miskin hanya tinggal di tiga provinsi (Aleppo, Hama, dan Deir-ez-Zor), dan provinsi-provinsi di bagian timur laut negara tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan rumah tangga yang menjadi pengungsi internal mempunyai risiko kemiskinan tertinggi. Laporan ini juga menyoroti bahwa pengiriman uang internasional telah menjadi sumber bantuan penting bagi rumah tangga Suriah. Penerimaan kiriman uang dari luar negeri dikaitkan dengan penurunan angka kemiskinan ekstrim sebesar 12 poin persentase dan penurunan angka kemiskinan ekstrem sebesar 8 poin persentase. Maka dari itu, tulisan ini akan melihat bagaimana ekonomi di Suriah memiliki kontraksi pertumbuhan yang buruk, terutama dalam ekonomi rumah tangga di tinjau dari perspektif keamanan ekonomi dari konsep keamanan manusia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Buku yang ditulis oleh Jeanne Gobat dan Kristina Kostial dengan judul *Syria's Conflict Economy* menerangkan beberapa masa Ketika sebelum konflik Suriah di tahun 2011 terjadi, fase ekonomi di Suriah. Lima tahun setelah pecah konflik ditemukan bahwa tantangan Suriah dalam mengubah ekonominya semakin sulit. Dua pesan penting yang digaris bawahi pada tulisan ini bahwa, perang internal membuat pendapatan daerah semakin terpuruk, membuang pembangunan ekonomi dan social didalam masyarakat terhambat. Dibutuhkan beberapa decade bahkan lebih untuk Suriah agar Kembali ke masa ekonomi sebelum konflik. Yang kedua yaitu, meskipun membangun Kembali infrastuktur fisik yang telah hancur menjadi tantangan yang lebih besar karena sumber daya manusia dan integritas social Suriah mengalami penurunan kualitas yang lebih parah akan menjadi tantangan untuk pembangunan berkelanjutan dikarenakan sebagian besar penduduk mengungsi dari tatanan social yang terkoyak, banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan penderitaan masyarakat lainnya selama konflik (Kostial, 2016).

Dalam buku yang berjudul, *The Consequences of Chaos: Humanitarian Crisis and The Failure to Protect* yang ditulis oleh Elizabeth Ferris dan Kemal Kirisci pada tahun 2016. Krisis pengungsi Suriah menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara tindakan untuk menyelesaikan konflik dan bantuan kemanusiaan untuk membantu para korban dan menunjukkan batas-batas respons kemanusiaan, bahkan dalam skala besar, untuk menyelesaikan krisis politik. Sifat krisis yang semakin berlarut-larut juga meningkatkan kebutuhan masyarakat internasional untuk berpikir lebih dari sekedar bantuan kemanusiaan dan mengadopsi kebijakan pembangunan untuk membantu pengungsi menjadi anggota produktif di komunitas tuan rumah mereka. Konsekuensi Kekacauan tidak hanya sekedar melihat jumlah penduduk Suriah yang terus meningkat, namun juga mempertimbangkan implikasi

jangka panjang terhadap ekonomi, politik, dan sosial dari perpindahan penduduk secara besar-besaran ini (Kirisici, 2016).

Kemudian dalam sebuah artikel berjudul *Syria's Economy Picking up the Pieces* yang ditulis oleh David Butter memaparkan beberapa poin utama Dampak konflik selama empat tahun terhadap perekonomian Suriah sulit diukur, dan tidak ada analisis statistik yang dapat secara memadai menggambarkan skala kehancuran manusia akibat perang tersebut. Meskipun demikian, tugas mitigasi dampak konflik dan perencanaan masa depan memerlukan pemahaman mengenai isu-isu inti perekonomian. Perekonomian Suriah telah mengalami kontraksi riil lebih dari 50 persen sejak tahun 2011, dengan penurunan output terbesar terjadi pada sektor energi dan manufaktur. Secara relatif, pertanian mempunyai peran yang lebih besar dalam output nasional, namun produksi pangan telah menurun tajam akibat konflik. Jumlah penduduk menyusut dari 21 juta menjadi sekitar 17,5 juta sebagai akibat dari migrasi keluar (terutama karena arus pengungsi) dan lebih dari seperempat juta kematian. Setidaknya sepertiga dari populasi yang tersisa menjadi pengungsi internal.

Inflasi rata-rata mencapai 51 persen antara Januari 2012 dan Maret 2015, menurut data bulanan yang dikeluarkan pemerintah, dan pound Suriah telah terdepresiasi sekitar 80 persen sejak awal konflik. Pemerintahan di Damaskus masih berfungsi sebagai pemerintahan nasional dalam hal penetapan anggaran, pengelolaan harga dan penyediaan layanan seperti listrik, namun integritas kelembagaannya telah terkikis. Ekonomi perang telah muncul dimana kelompok-kelompok seperti ISIS, PYD Kurdi dan pemberontak di barat laut dan selatan telah membentuk wilayah ekonomi yang otonom, dan dimana peran bantuan internasional dalam mempertahankan populasi menjadi semakin penting. Rezim Assad telah menerima dukungan ekonomi penting dari Iran dalam bentuk pasokan minyak dan kredit untuk memungkinkan impor komoditas dan peralatan. Namun, Iran menetapkan kondisi politik dan ekonomi untuk terus memberikan bantuan tersebut. Kemajuan militer yang dilakukan ISIS dan pemberontak anti-rezim pada awal tahun 2015 telah memberikan tekanan lebih lanjut terhadap Assad, termasuk dalam bidang ekonomi. Ketika konflik memasuki fase baru, tantangan-tantangan ekonomi baru akan muncul, termasuk tugas perencanaan untuk dampaknya (Butter, 2015).

Dari beberapa literature diatas, kita dapat menemukan satu garis persamaan dimana masalah ekonomi akan semakin memburuk jika konflik Suriah tak kunjung selesai. Bukan hanya pendapatan negara yang memburuk, membangun pertumbuhan ekonomi bagi negara konflik bukanlah lagi hal utama, maka tidak jarang hanya mampu memanfaatkan bantuan dari luar untuk memebuhi kebutuhan masyarakat didalam negara tersebut. Namun tulisan ini akan melihat secara lebih spesifik bagaimana persoalan pertumbuhan ekonomi didalam rumah tangga masyarakat Suriah melalui pendekatan keamanan ekonomi dari konsep keamanan manusia dalam hubungan internasional.

3. METODE

Teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dimana memahami fakta yang digunakan dari data yang diperoleh kemudian dijadikan landasan dalam pengambilan kesimpulan oleh penulis (Sudaryono, 2017). Diawali dengan mengumpulkan fakta - fakta dari objek yang berkaitan kemudian fakta – fakta tersebut diubah menjadi general empiris, dan kemudian melalui general empiris dapat dilakukan perumusan konsep, merangkai preposisi dan diubah untuk menjadi induksi teori (Mas'oed, 1990).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Krisis konflik Suriah dan Dampak Terhadap Ekonomi

Dimulai pada bulan Maret 2011, perang brutal di Suriah menghancurkan negara tersebut, memicu krisis kemanusiaan regional, dan meratakan perekonomian. Kenyataannya, permasalahan politik dan ekonomi yang berkepanjangan mendorong negara ini menuju ketidakstabilan. Ketika Assad berkuasa pada tahun 2000, terjadi sedikit perubahan politik menuju partisipasi politik yang lebih besar di negara tersebut. Namun demikian, perubahan ini dengan cepat dibalikkan, dan Assad kembali ke kebijakan otoriter ayahnya. Secara ekonomi, meskipun Assad dimaksudkan untuk memimpin negara menuju liberalisasi, kebijakan-kebijakannya terutama membantu memberdayakan jaringan kapitalis yang setia kepada pemerintah. Memang ada dua faktor utama yang berperan penting dalam menyebarkan protes. Faktor pertama adalah kurangnya kebebasan politik, sedangkan faktor kedua adalah kondisi ekonomi yang menyedihkan yang dilambangkan dengan tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan dan korupsi (Ahmet Yilmaz ATA, 2021).

Kegiatan perekonomian mengalami kontraksi Ketika protes pecah pada 2011, di semua sektor sebagai akibat dari kerusakan parah pada infrastruktur dan di banyak ibu kota strategis; bendungan dan irigasi, transportasi, kota industri, dll. Biro Pusat Statistik (CBS) menunjukkan kontraksi PDB sebesar 55% antara tahun 2011 dan 2020. Menyusul gempa bumi yang melanda negara tersebut pada bulan Februari 2023, bank dunia memperkirakan PDB Suriah akan mengalami kontraksi tambahan sebesar 2,3%, dibandingkan dengan kontraksi sebelumnya sebesar 3,2% pada kuartal pertama (World Bank, 2023). Kontraksi tambahan terutama terjadi pada . Setelah tahun 2000, ketika sektor swasta diberikan kendali perekonomian dan peran negara ditarik, porsi sektor swasta dalam total investasi sama dengan porsi investasi sektor publik. Selama lima tahun (2006–2010), porsi investasi swasta dalam persentase PDB meningkat menjadi 11,2% sementara investasi publik berada pada angka 8,3%. Proses liberalisasi setelah tahun 2004 berkontribusi pada kebangkitan sektor swasta, mengikuti LD No.8 pada tahun 2007. Kontrak proyek investasi berjumlah sekitar US\$9,2 miliar (26% dari PDB) pada tahun 2007 di bidang pariwisata, dan nyata didorong oleh penghancuran modal fisik, dan gangguan pada aktivitas perdagangan dan sektor hidrokarbon; produksi minyak mentah telah turun tajam sebesar 80% dibandingkan tingkat tahun 2010 (Forat Suliman, 2023).

Kinerja sektor swasta dan publik dapat dinilai berdasarkan tingkat pembentukan modal: tingkat investasi total telah menyusut secara signifikan; angka tersebut menurun dari 20,5% PDB selama periode reformasi (2001-2010) menjadi kurang dari 8% PDB selama 2016–2020. Dalam sepuluh tahun konflik, investasi publik turun drastis menjadi 3,5 pada periode (2012–2020), dan tingkat investasi swasta menurun drastis hingga kurang dari 5% selama lima tahun kedua konflik (2016–2020). Temuan utamanya adalah: (1) perekonomian menghadapi keterbatasan ekstrim dalam meningkatkan tingkat investasi karena total porsi investasi terhadap PDB (dalam jangka waktu *real*) telah turun dari 20% pada tahun 2010 menjadi kurang dari 7% pada tahun 2020; (2) investasi publik tampaknya mempunyai peran yang signifikan karena mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Suriah secara langsung dan tidak langsung melalui investasi swasta (yang mana efek *crowding-in* terbukti signifikan). Lebih lanjut, kami berpendapat bahwa faktor politik dan kelembagaan akan menentukan bentuk dan ruang lingkup penarikan modal asing dan peningkatan bisnis lokal selama tahap rekonstruksi (Forat Suliman, 2023).

B. Konstraksi Pertumbuhan (Ekonomi) Rumah Tangga Suriah

Jika kita banyak membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi dalam konflik, maka resiko yang paling fatal salah satunya adalah Ketika ketidak stabilan ekonomi telah merambah pada kebutuhan inti manusia, terutama sandang, pangan dan papan. Konflik berkepanjangan di Suriah telah menimbulkan efek jangka Panjang, sehingga permasalahan ekonomi saat ini juga telah mengancam keamanan

manusia. Perekonomian Suriah percepatan laju inflasi selama periode 2011-2018 sebagai akibat dari perang dan sanksi ekonomi yang menguras kekayaan rakyat, membatasi sektor produksi secara keseluruhan, mengurangi produktivitas, memperdalam ketidakseimbangan struktural, dan memaksa ekonomi makro ke dalam kebijakan penghematan yang koersif yang meningkatkan kesenjangan dan kontradiksi antara permintaan dan penawaran. Hal ini mengakibatkan tingkat penurunan produktivitas yang lebih tinggi, dan keadaan kontraksi dalam penawaran agregat, disertai dengan tidak adanya agenda yang jelas untuk mengelola dan menahan krisis Suriah, memulihkan aktivitas ekonomi, dan merevitalisasi pembentukan modal dan produksi (Tuffaha, 2023).

Dalam laporan yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2024, menunjukkan bagaimana kontraksi pertumbuhan ekonomi Suriah khususnya dalam Rumah Tangga. Kesejahteraan rumah tangga semakin memburuk. Akses ke layanan kesehatan, sistem air, dan pasar makanan di wilayah utara Suriah yang paling terdampak terus menurun. Sementara masyarakat yang paling terdampak gempa bumi memiliki tingkat akses yang relatif lebih tinggi ke layanan kesehatan dan pasar makanan, kedua indikator tersebut telah menurun. Khususnya, di antara masyarakat yang paling terdampak, persentase yang melaporkan akses ke pasar makanan menurun dari 93 persen pada April 2023 menjadi 89 persen pada Desember 2023 (World Bank Group, 2024).

Sebagian besar rumah tangga melaporkan kemampuan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lebih dari dua pertiga rumah tangga melaporkan tidak cukup atau sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan harga dan pengangguran merupakan alasan yang paling sering dikutip yang membatasi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan angka serupa dilaporkan oleh penduduk, pengungsi, dan pengungsi internal. Rumah tangga sering kali terpaksa menggunakan mekanisme penanggulangan karena meningkatnya kerentanan keuangan, melonjaknya harga, dan berkurangnya akses ke layanan penting seperti sekolah, dan fasilitas Kesehatan lainnya.

Dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, PDB riil diperkirakan akan berkontraksi sebesar 1,5% pada tahun 2024, memperpanjang penurunan sebesar 1,2% pada tahun 2023. Konsumsi swasta, mesin utama pertumbuhan, akan tetap terkendali karena kenaikan harga terus mengikis daya beli. Investasi swasta diperkirakan akan tetap lemah di tengah situasi keamanan yang bergejolak serta ketidakpastian ekonomi dan kebijakan yang besar. Inflasi diperkirakan akan tetap tinggi pada tahun 2024 karena dampak langsung depresiasi mata uang, kekurangan yang terus-menerus, dan potensi pemotongan subsidi pangan dan bahan bakar lebih lanjut. APBN tahun 2024 menandakan berlanjutnya tren pengurangan subsidi untuk komoditas-komoditas penting.

Bagian Fokus Khusus laporan ini memberikan gambaran singkat tentang temuan-temuan utama laporan Kesejahteraan Rumah Tangga Suriah. Pada tahun 2022, kemiskinan mempengaruhi 69% populasi – setara dengan sekitar 14,5 juta warga Suriah. Kemiskinan ekstrem, meski sebenarnya tidak ada sebelum konflik, berdampak pada lebih dari satu dari empat warga Suriah pada tahun 2022 dan mungkin akan semakin memburuk akibat dampak buruk gempa bumi pada bulan Februari 2023. Berbagai faktor eksternal, termasuk krisis keuangan tahun 2019 di Lebanon, pandemi COVID-19, dan perang di Ukraina, telah berkontribusi semakin mengikis kesejahteraan rumah tangga Suriah dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan tersebut, kemiskinan di Suriah mempunyai konotasi spasial yang kuat. Lebih dari 50% masyarakat sangat miskin hanya tinggal di tiga provinsi (Aleppo, Hama, dan Deir-ez-Zor), dan provinsi-provinsi di bagian timur laut negara tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan rumah tangga yang menjadi pengungsi internal mempunyai risiko kemiskinan tertinggi. Laporan ini juga menyoroti bahwa pengiriman uang internasional telah menjadi sumber bantuan penting bagi rumah tangga Suriah (World Bank Group, 2024).

Dari tahun 2006 hingga 2011, kekeringan ekstrem menyebabkan ratusan ribu orang – kebanyakan petani pedesaan mengalami kelaparan dan kemiskinan. Banyak yang meninggalkan rumah dan lahan pertanian mereka untuk mencari makanan di pusat kota. Di tengah darurat iklim ini, Arab Spring gelombang protes pro-demokrasi terjadi pada tahun 2010 dan melanda banyak negara di Timur Tengah. Di Suriah, kesulitan ekonomi ditambah dengan frustrasi sosial memuncak pada protes yang meluas.

Di provinsi Daraa, daerah pedesaan miskin yang dilanda kekeringan, di Suriah selatan, protes besar pertama terjadi pada bulan Maret 2011. Pemerintah menanggapi dengan penindasan yang kejam. Berbagai kelompok oposisi terbentuk, dan konflik dengan cepat meningkat. Selama dekade berikutnya, perang saudara terus memburuk seiring dengan semakin banyaknya kelompok yang terlibat. Selama perang saudara, krisis-krisis lain di Suriah dan seluruh dunia memperburuk situasi. Suriah kembali mengalami kekeringan pada tahun 2021 yang berlanjut hingga hari ini. Kekurangan air, layunya lahan pertanian, dan lonjakan harga pangan secara besar-besaran telah menyebabkan jutaan orang mengalami kelaparan yang parah. Pada tahun 2022, perang di Ukraina dimulai dan menimbulkan guncangan pada perekonomian global. Dampak ekonomi dari perang ini sangat parah terhadap negara-negara di Timur Tengah dan Afrika. Meskipun harga makanan dan bahan bakar telah meningkat di Suriah akibat kekeringan dan perang saudara, konflik di Ukraina menyebabkan hal tersebut *meroket* (Psaropoulos, 2025).

Lebih dari 85% warga Suriah di Suriah utara yang disurvei oleh IRC mempunyai utang; lebih dari 90% tidak dapat membayarnya kembali. 60% membeli makanan secara kredit. Hampir 50% menyebutkan penjualan produk (termasuk produk hewani, tanaman pangan, produk pertanian, ikan, peternakan, bahan bakar gas) sebagai sumber pendapatan utama mereka. Hampir 60% responden mengidentifikasi makanan atau uang untuk membeli makanan sebagai kebutuhan terbesar rumah tangga mereka yang belum terpenuhi. 40% mengamati adanya pekerja anak di pasar lokal, dan menghubungkan hal ini dengan kemiskinan dan perlunya kontribusi keluarga untuk bekerja (The International Rescue Committee, 2024).

Berdasarkan data, 50% rumah tangga yang disurvei mengatakan bahwa mereka kini bergantung pada kredit atau utang untuk membeli makanan, dan hampir semuanya mengindikasikan bahwa mereka kini kesulitan membayar cicilan. IRC mensurvei hampir 3.000 orang di lima provinsi di utara Suriah. Pesertanya termasuk pengungsi internal Suriah, mereka yang kini telah kembali ke kampung halamannya, dan komunitas yang menampung keluarga pengungsi. Sebagai tanda bahwa kemerosotan perekonomian memperburuk kebutuhan kemanusiaan, hampir separuh responden mengandalkan penjualan apa pun yang mereka miliki di rumah mulai dari produk hewani, hasil panen, produk pertanian, ikan, ternak, hingga bahan bakar atau gas untuk menghasilkan pendapatan. Sebagian besar dari mereka yang disurvei kini terlilit utang, meminjam uang untuk membeli kebutuhan dasar, membayar layanan seperti layanan kesehatan, atau membayar sewa rumah.

C. Perspektif Keamanan Ekonomi dalam Konsep Keamanan Manusia

Keamanan ekonomi terdiri dari jaminan sosial dasar, yang didefinisikan oleh akses terhadap infrastruktur kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, informasi, dan perlindungan sosial, serta keamanan terkait pekerjaan. Jika kita melihat definisi dari keamanan secara umum dimana merupakan kemampuan mempertahankan diri dalam menghadapi segala ancaman, seperti kutipan melalui buku *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* oleh Barry Buzan “*Security, in any objective sense, measures the absence of fear that such values will be attacked*” (Buzan, People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, 2008). Sebagaimana tercantum dalam resolusi Majelis Umum 66/290, “keamanan manusia adalah sebuah pendekatan untuk membantu

Negara-negara Anggota dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan yang tersebar luas dan lintas sektoral terhadap kelangsungan hidup, penghidupan dan martabat rakyatnya.” Resolusi ini menyerukan “respon yang berpusat pada masyarakat, komprehensif, spesifik konteks, dan berorientasi pada pencegahan yang memperkuat perlindungan dan pemberdayaan semua orang.” (General Assembly United Nation, 2012).

Konsep keamanan kemudian berkembang terutama dipengaruhi oleh isu konflik yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap pengungsi akibat konflik, kekerasan terhadap perempuan dan anak, terorisme, perdagangan senjata dan lain sebagainya. Komponen utama yang perlu dilindungi salah satunya adalah manusia, dimana hak pribadi adalah masalah yang paling sederhana sebelum membicarakan keamanan negara. Keamanan manusia kemudian menjadi salah satu konsen dalam paradoks hubungan internasional, UNDP kemudian menjabarkan setidaknya 7 komponen keamanan manusia, diantaranya yaitu:

1. Keamanan Ekonomi (bebas dari kemiskinan dan pemenuhan jaminan kebutuhan hidup)
2. Keamanan Makanan (kemudahan terhadap akses kebutuhan pangan)
3. Keamanan Kesehatan (kemudahan mendapatkan layanan Kesehatan dan perlindungan dari penyakit)
4. Keamanan Lingkungan (perlindungan dari polusi udara dan kerusakan lingkungan)
5. Keamanan Perorangan (keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan bahkan kecelakaan lalu lintas)
6. Keamanan Kelompok (kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya)
7. Keamanan Politik (Perlindungan terhadap HAM dan kebebasan berpolitik) (FA, 2019) (UNDP, 1994).

Dari 7 komponen tersebut keamanan ekonomi menjadi salah satu sub kajian melihat dari ketidak stabilan hak yang diterima oleh warga Suriah. Menurut World Bank, kemiskinan sebagai penurunan kesejahteraan manusia yang tidak dapat diterima, yang dapat berupa kerugian fisiologis dan sosial. Deprivasi fisiologis melibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan material atau biologis dasar, termasuk gizi, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang tidak memadai. Seseorang dapat dikatakan miskin apabila ia tidak mampu memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Brian Ames, 2001).

Di luar kebijakan spesifik apa pun, nilai dari lensa keamanan ekonomi adalah menawarkan tujuan, arah dan orientasi reformasi sosial, pada perubahan-perubahan, sebagai berikut:

- Meningkatkan jaminan kerja dan meningkatkan kontrol di tempat kerja, serta meningkatkan perlindungan finansial jika seseorang kehilangan pekerjaan atau tidak dapat bekerja untuk jangka waktu tertentu.
- Menawarkan bantuan dan ruang bagi mereka yang mencari pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang aman, sekaligus membuat pekerjaan menjadi mungkin dan diinginkan bagi mereka yang berada di luar pasar tenaga kerja.
- Memperluas akses terhadap rumah yang aman, baik yang disewa atau dimiliki, melalui intervensi untuk membangun lebih banyak rumah baru dan mengubah distribusi rumah yang ada.
- Melindungi waktu bagi keluarga dan untuk merawat kehidupan kerja, sekaligus membangun dan memperkuat infrastruktur layanan perawatan yang dapat diandalkan oleh keluarga.
- Memastikan jaminan sosial memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, serta membangun ‘jaring pengaman sosial’ berupa dukungan krisis, bantuan praktis, dan hubungan sosial di tempat masyarakat tinggal.

- Membantu masyarakat memperoleh tabungan dalam jumlah kecil, mengakses kredit yang terjangkau, mendapatkan keringanan dari hutang bermasalah dan memiliki aset (terutama mereka yang tidak memiliki akses terhadap kekayaan keluarga).
- Menempatkan ketentuan pensiun di masa depan pada landasan yang lebih aman, dengan menaikkan tingkat iuran minimum dan mereformasi tahap deakumulasi sehingga tidak semua risiko terhadap pendapatan pensiun ditanggung oleh individu (Joseph Rowntree Foundation, 2023).

D. Upaya Pemerintah Suriah Menghadapi Kontraksi Pertumbuhan Rumah Tangga yang Buruk Melalui Perspektif Keamanan Ekonomi

Pemerintah punya peran penting dalam menjamin kesejahteraan warganya. Tidak terpenuhinya keamanan ekonomi menjadi salah satu indikator ketidakberhasilan sebuah pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah Suriah harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki perekonomian warganya terutama dalam Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Suriah dalam menghadapi kontraksi pertumbuhan rumah tangga yang buruk salah satunya adalah mengusahakan Reintegrasi Pasca Perang.

Strategi Reintegrasi Pascaperang, Pemerintah Suriah dan negara-negara yang kini menampung para pengungsi ini harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pengungsi Suriah berhasil diintegrasikan kembali ke tanah air mereka. Saling pengertian dan akuntabilitas bersama harus menjadi landasan kemitraan ini untuk menjamin bahwa pengungsi yang kembali memiliki akses terhadap perumahan, kesempatan kerja, dan layanan penting. Selain memberikan kerangka kerja bagi rehabilitasi dan revitalisasi Suriah, langkah-langkah tersebut juga penting untuk meningkatkan stabilitas jangka panjang dan menghentikan lebih banyak pengungsian (Abdel-Fattah, 2024).

Namun, jutaan pengungsi Suriah yang kembali secara tiba-tiba dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, membebani sistem, dan mengakibatkan lebih banyak pengungsi, yang dapat menghambat transisi negara tersebut menuju Suriah pasca-konflik dan mungkin memicu krisis kemanusiaan yang lebih serius. Akibat Perang Saudara selama bertahun-tahun, perekonomian Suriah hancur, industri-industri penting seperti pariwisata, pertanian, dan industri hancur total, menyebabkan meluasnya pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, sektor publik yang sudah terlalu banyak bekerja, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, akan kesulitan memenuhi permintaan tambahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah terbebannya perekonomian Suriah yang sudah lemah, reintegrasi harus dilakukan secara bertahap.

Penerapan strategi reintegrasi bertahap memungkinkan perekonomian beradaptasi secara bertahap terhadap peningkatan permintaan sumber daya, mendorong pembangunan infrastruktur penting secara paralel, seperti perumahan, transportasi, dan layanan penting, untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi, dan dapat membantu pemulihan ekonomi. dengan memprioritaskan kembalinya pengungsi yang memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan, seperti di bidang konstruksi, kesehatan, dan pertanian.

Membantu kembalinya pengungsi Suriah yang berbakat, khususnya mereka yang tinggal di UE dan negara-negara lain, dapat sangat bermanfaat bagi upaya rehabilitasi Suriah. Dengan pengetahuan mereka mengenai bidang-bidang penting bagi pemulihan negara, para ahli ini dapat membantu memulihkan infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, dan meningkatkan hasil pertanian. Kepulangan mereka mungkin mempunyai dampak multiplikatif, yaitu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk saat ini dan mereka yang kembali. Terwujudnya Suriah yang damai dan sukses mungkin

akan sangat terbantu oleh para pengungsi yang kembali ini, yang mungkin akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengisi kesenjangan keterampilan yang penting. Namun untuk menarik para pengungsi yang terampil, mereka harus diberi akses terhadap paket dukungan reintegrasi yang lengkap, yang mencakup program bimbingan, sumber daya keuangan, insentif yang menarik seperti pembebasan pajak, dan peluang bisnis yang dapat membujuk para pengungsi berbakat untuk kembali dan berkontribusi pada rekonstruksi Suriah.

Selain memberikan jaminan kesempatan kerja, khususnya di sektor-sektor penting seperti konstruksi dan layanan kesehatan, memberikan pengungsi akses terhadap program pengembangan keterampilan seperti pelatihan kejuruan dan kursus bahasa akan meningkatkan kemampuan kerja mereka di pasar kerja Suriah yang terus berubah. Penyediaan bantuan keuangan melalui pinjaman mikro atau hibah akan memungkinkan pengungsi untuk memulai usaha, membeli kebutuhan, dan membangun kembali kehidupan mereka. Lembaga keuangan mikro dapat memberikan pelatihan bisnis dan mendirikan inkubator bisnis, yang akan menumbuhkan peluang ekonomi jangka panjang dan menstimulasi perekonomian lokal. Upaya reintegrasi yang mencakup berbagai aspek memerlukan pendekatan kolaboratif untuk memastikan pengungsi mendapat dukungan baik secara ekonomi maupun sosial.

Selain itu, sangat penting untuk memberikan akses terhadap perumahan dengan harga terjangkau, layanan kesehatan berkualitas tinggi, dan fasilitas dasar yang dapat diandalkan seperti listrik, air, dan pendidikan. Keberhasilan reintegrasi pengungsi memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan melalui penegakan hukum yang efisien dan perbaikan infrastruktur penting. Rehabilitasi infrastruktur adalah bidang utama lainnya yang dapat dibantu oleh para pengungsi. Mereka dapat dilibatkan untuk membantu merehabilitasi rumah, sekolah, rumah sakit, dan jalan di Suriah melalui proyek pekerjaan umum. Langkah-langkah ini akan menciptakan peluang kerja sekaligus mengatasi masalah perumahan. Selain itu, agar pengungsi dapat berintegrasi dengan baik ke dalam angkatan kerja Suriah, diperlukan peraturan ketenagakerjaan yang inklusif, seperti undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan agama, etnis, atau status pengungsi. Keuntungan pajak bagi pemberi kerja yang menerima pengungsi dapat menginspirasi perusahaan lain untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja.

Selain itu, perekonomian Suriah terutama bertumpu pada pertanian, sehingga pembangunan pedesaan dan pertanian merupakan elemen penting dalam proses reintegrasi. Inisiatif yang bertujuan mengundang pengungsi yang bermukim kembali untuk terlibat dalam pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung stabilitas ekonomi. Memberikan akses terhadap tanah, benih, peralatan, dan sistem irigasi kepada pengungsi yang kembali dapat membantu upaya mereka membangun kembali kehidupan mereka. Selain itu, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dan mendorong perluasan agribisnis dapat meningkatkan hasil pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian lokal.

Selain itu, mengintegrasikan pengiriman uang pengungsi ke dalam perekonomian lokal memberikan peluang lain bagi kemajuan ekonomi. Banyak migran mengirim uang ke keluarga mereka, dan meresmikan jalur pengiriman uang dapat membantu perekonomian lokal. Untuk mendorong pertumbuhan masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi jangka panjang, dorong para pengungsi untuk membelanjakan keuntungan mereka di perusahaan terdekat atau kegiatan amal. Komponen penting lainnya dalam proses reintegrasi adalah membangun kembali kepercayaan dan mendorong rekonsiliasi antara penduduk lokal dan pengungsi. Melibatkan masyarakat dan pengungsi dalam pengambilan keputusan proyek pembangunan lokal membantu meningkatkan rasa akuntabilitas dan kepemilikan bersama terhadap rekonstruksi. Inisiatif untuk meningkatkan kesadaran budaya juga dapat membantu mendorong hidup berdampingan secara damai dan pemahaman yang lebih baik.

Yang terakhir, reintegrasi yang terfokus ini merupakan sebuah proses panjang yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dilaksanakan, dan hal ini memerlukan upaya yang terkoordinasi dan terencana dari pemerintah Suriah, organisasi internasional, dan negara-negara yang menampung pengungsi Suriah. Kolaborasi pemerintah-swasta antara LSM, pemerintah, dan sektor korporasi dapat menjadi sangat penting bagi proses reintegrasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini dapat dicapai dengan memupuk konsensus global melalui kerangka kerja seperti *Global Compact on Refugees* dan Konvensi Pengungsi 1951, yang memungkinkan negara-negara donor membuat janji eksplisit untuk mendukung inisiatif reintegrasi finansial dan teknis. Negara-negara tuan rumah, bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, harus menandatangani perjanjian multilateral untuk meningkatkan reintegrasi pengungsi dalam agenda global. Bantuan signifikan dapat diberikan oleh lembaga-lembaga internasional termasuk Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF). Bank Dunia mungkin menyumbangkan pengetahuan teknis dan dukungan keuangan untuk proyek rehabilitasi. IMF dapat menstabilkan perekonomian Suriah dan mendorong ekspansi jangka panjang. UNDP dapat membantu komunitas lokal dan memudahkan pengungsi untuk berintegrasi kembali.

Akibatnya, keberhasilan reintegrasi pengungsi Suriah merupakan misi yang rumit dan beragam sehingga memerlukan strategi kolaboratif yang komprehensif. Pemerintah Suriah dan negara-negara yang menampung pengungsi Suriah dapat bekerja sama untuk menciptakan kondisi bagi kepulauan semua orang yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan. Kembalinya pengungsi secara bertahap tidak hanya menghasilkan tenaga kerja dan keterampilan, namun juga kemungkinan untuk menjembatani kesenjangan di antara komunitas-komunitas yang terpecah belah. Keberhasilan upaya-upaya ini bergantung pada kapasitas pemerintah baru dalam memberikan hasil yang nyata, menjaga stabilitas politik, dan mendapatkan pendanaan internasional untuk operasi rekonstruksi. Hal ini penting untuk memenuhi visi pemerintah baru dalam mengadopsi model pasar bebas dengan mengintegrasikan negara tersebut ke dalam perekonomian global seperti yang dinyatakan oleh Bassel Hamwi, kepala Kamar Dagang Damaskus, tiga hari setelah pasukan pemberontak menggulingkan Presiden Assad. Tanpa tahapan-tahapan penting ini, upaya pembangunan kembali Suriah mungkin akan gagal karena kesulitan-kesulitan yang belum terselesaikan dan harapan-harapan yang tidak terpenuhi.

5. KESIMPULAN

Perspektif keamanan yang berkembang dalam hubungan internasional muncul untuk mewujudkan adanya kestabilan di dunia dan melindungi hak paling sederhana yang harus dimiliki oleh manusia. Ada sekitar 7 komponen atau hak keamanan yang harus diciptakan. Salah satu komponen yaitu hak ekonomi, dimana ini merupakan hal yang harus dimiliki suatu negara sebagai pemangku kebijakan untuk memberikan kesejahteraan secara ekonomi yang layak bagi warga negaranya. Suriah sebagai negara yang telah berkonflik selama beberapa dekade menerima dampak jangka Panjang yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Tentunya efek ketidakstabilan ekonomi ini kemudian berdampak kepada perekonomian rumah tangga, ketidak tersedianya lapangan pekerjaan, pengangguran, sehingga menyebabkan warganya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dan ekonomi rumah tangganya sendiri.

Upaya pemerintah kemudian sangat diperlukan untuk mendukung dan menjadi solusi atas ketidakmampuan warganya sendiri untuk menstabilkan ekonomi rumah tangga. Tantangan ini menjadi hal yang berat bagi pemerintah Suriah terutama karena negara ini perlu bangkit dari keterpurukan konflik. Tidak banyak hal signifikan yang mampu dilakukan, namun upaya pemerintah Suriah yang saat ini tengah dilakukan adalah dengan strategi reintegrasi pasca perang. Memulangkan Kembali warga Suriah yang menjadi pengungsi ke negaranya. Meski pada dasarnya upaya ini dalam perjalanannya tetap memiliki efek mengguncang ketidakstabilan ekonomi, namun dengan adanya

kembali sumber daya manusia dapat memenuhi kembali rumah, tenaga kerja dan membangun kembali akses ke sektor lainnya agar dapat mewujudkan keamanan ekonomi kembali terutama dalam pemenuhan perekonomian rumah tangga warga Suriah itu sendiri.

REFERENSI

- [1]Blanchard, C. M. (2023). *Syria Conflict Overview: 2011-2021*. Congressional Research Service.
- [2]World Bank Group. (2024, Mei 24). *Syria: Growth Contraction Deepens and the Welfare of Syrian Households Deteriorates*. Diambil kembali dari News: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/24/syria-growth-contraction-deepens-and-the-welfare-of-syrian-households-deteriorates>
- [3]The World Bank. (2024). *Syria Economic Monitor Conflict, Crises, and the Collapse of Household Welfare*. The World Bank.
- [4]International Rescue Committee. (2022). *Crisis in Syria: Economic crisis compounds over a decade of war*. International Rescue Committee.
- [5]Kostial, J. G. (2016). *Syria's Conflict Economy*. International Monetary Fund.
- [6]Kirisci, E. F. (2016). *The Consequences of Chaos: Humanitarian Crisis and The Failure to Protect*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- [7]Butter, D. (2015). Syria's economy Picking up The Pieces. *Middle East and North Africa Programme*, 1-31.
- [8]Sudaryono. (2017). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [9]Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3ES.
- [10]Ahmet Yılmaz ATA, M. A. (2021). SYRIAN CONFLICT AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT: DID THE ECONOMIC INDICATORS PREDICT THE CONFLICT? *Journal of Economics and Research*, 1-16.
- [11]World Bank. (2023). *A World Bank Group Flagship Report Global Economic Prospects*. World Bank.
- [12]Forat Suliman, H. K. (2023). An Analysis of the Syrian Economy in the Era of Military Conflict, 2011–2020: The Perspective of Government and Economics. *Journal of Government and Economic*, Vol 11.
- [13]Tuffaha, A. A. (2023). The Impact of Changing the Price Index on the Stagnation of Industrial Production in Syria During the Crisis Phase (2011-2018). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*.
- [14]World Bank Group. (2024, Mei 24). *Syria: Growth Contraction Deepens and the Welfare of Syrian Households Deteriorates*. Diambil kembali dari World Bank: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/24/syria-growth-contraction-deepens-and-the-welfare-of-syrian-households-deteriorates>
- [15]Psaropoulos, J. T. (2025, Januari 23). *As Trump vows to end war, Ukraine's deep strikes weaken Russia*. Diambil kembali dari Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2025/1/23/as-trump-takes-us-oath-ukraines-deep-strikes-weaken-russias-war-effort>

- [16]The International Rescue Committee. (2024, Maret 14). *Syria: Deepening economic crisis compounds conflict misery, as Syria crisis enters its fourteenth year and humanitarian needs reach unprecedented levels, warns the IRC*. Diambil kembali dari International Rescue Committee: <https://www.rescue.org/press-release/syria-deepening-economic-crisis-compounds-conflict-misery-syria-crisis-enters-its>
- [17]Buzan, B. (2008). *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. ECPR Press.
- [18]General Assembly United Nation. (2012). *Resolution adopted by the General Assembly on 10 September 2012* . United Nation.
- [19]FA, J. Q. (2019). GAGASAN HUMAN SECURITY DALAM KEBIJAKAN PERSONAL SECURITY TINJAUAN TERHADAP DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KEBIJAKAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG. *Responsive Universitas Padjajaran*, 8-13.
- [20]UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.
- [21]Brian Ames, W. B. (2001). *Macroeconomic Policy and Poverty Reduction*. New York: International Monetary Fund and the World Bank.
- [22]Joseph Rowntree Foundation. (2023, Juli 20). *Economic security: A foundation for dignity, opportunity and hope in an age of uncertainty*. Diambil kembali dari JRF: <https://www.jrf.org.uk/economic-security-a-foundation-for-dignity-opportunity-and-hope-in-an-age-of-uncertainty>
- [23]Abdel-Fattah, P. (2024, Desember 2024). *From Displacement to Development: Syria's Path to Reintegration*. Diambil kembali dari Al Habtoor Research Center: <https://www.habtoorresearch.com/programmes/displacement-development-syrias-reintegration/>